

**PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KB (PLKB)
TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM
PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DESA CIGUGUR
KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN**

ASEP RAHMAN

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB)?; 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?; 3) Bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan kader serta pasangan usia subur. Teknik analisa data adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, koefisien detriminasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasikan sebesar 54,19%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Artinya telah melaksanakan tiga strategi menurut Fitriani (2010:94). Begitupula hasil wawancara bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaannya. Sementara itu hasil observasi bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188.25 berada pada kategori cukup, apabila dipresentasikan sebesar 62.75%. Hasil wawancara bahwa upaya meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan berbagai upaya. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi PLKB terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19 %, artinya 57,19 % partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).

Kata Kunci : Komunikasi PLKB, Partisipasi Pasangan Usia Subur.

A. PENDAHULUAN

Gerakan keluarga berencana sekarang ini sedang berusaha meningkatkan mutu para pelaksana dan pengelola agar masyarakat mengetahui pentingnya program keluarga berencana. Pemerintah terus memotivasi, menghimbau, dan menekankan pada masyarakat agar memiliki keluarga kecil dengan slogan program keluarga berencana “Dua anak lebih baik”. Keseriusan pemerintah dalam menyukseskan program keluarga berencana dibuktikan dengan kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang rutin melakukan penyuluhan keluarga berencana agar masyarakat mau mengikuti program keluarga berencana.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam program KB. peranan petugas lapangan KB sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program KB. Petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB) merupakan ujung tombok pengelola program KB di lini lapangan. Petugas lapangan KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai suatu daerah. Petugas lapangan KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh petugas lapangan KB yaitu dengan melakukan komunikasi dengan tujuan untuk membagi pengetahuan dan pengalaman, melalui komunikasi sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Komunikasi petugas lapangan KB merupakan suatu pertukaran informasi, berbagi ide dan pengetahuan petugas kesehatan kepada masyarakat. Hal ini berupa proses dua arah dimana informasi, pemikiran, ide, perasaan atau opini disampaikan atau dibagikan melalui kata-kata, tindakan maupun isyarat untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi yang baik berarti bahwa para pihak terlibat secara aktif yaitu antara petugas kesehatan dan masyarakat.

Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru memiliki jumlah PLKB yang belum memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan karena PLKB yang ada sekarang sebagian besar belum mendapatkan pelatihan khusus sebagaimana seharusnya. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya target dari program KB yang telah ditetapkan. Yang menjadi pemikiran adalah bagaimana para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan penyuluhan alat kontrasepsi kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan dapat menggunakan alat kontrasepsi.

UPTD DKBP3A Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yang diberi kewenangan dalam pengelolaan program KB dengan keterbatasan tenaga, anggaran, sarana dan prasarana selalu berusaha agar program KB dapat terlaksana dengan baik yang salah satunya melalui kegiatan komunikasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik secara tatap muka yang harus dijalankan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Bahwa dengan komunikasi yang baik Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat meyakinkan Pasangan Usia Subur untuk mengikuti program Keluarga Berencana.

Berdasarkan data hasil penjangkauan di lapangan, menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan, rendahnya sumber daya pelaksana dari segi kualitas maupun kuantitas mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana khususnya dalam penggunaan alat kontrasepsi belum optimal.

Beberapa permasalahan menyangkut rendahnya partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang belum benar-benar memiliki

kesadaran akan pentingnya program KB. Contohnya : Masyarakat kurang merespon program KB secara positif sehingga menyebabkan adanya pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti pada tahun 2014 dari target PUS sebesar 5825 orang hanya sebanyak 5346 yang menjadi peserta KB Aktif sehingga sebanyak 479 orang tidak mengikuti program KB.

2. Masih adanya masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang manfaat menggunakan alat kontrasepsi. Contohnya : Masih adanya masyarakat yang mengkhawatirkan akan dampak buruk penggunaan alat kontrasepsi dan mempertentangkan program KB dengan ajaran agama, sehingga tidak menggunakan alat kontrasepsi.

3. Masih adanya masyarakat yang memiliki pendirian/paham bahwa program KB dapat menyebabkan kegemukan sehingga masyarakat tidak menggunakan alat kontrasepsi serta menggunakan alat kontrasepsi itu mahal. Contohnya : Masyarakat lebih memilih cara-cara tradisional untuk mengurangi jumlah kelahiran walaupun hal tersebut belum tentu keberhasilannya.

Permasalahan tersebut di atas, diduga karena komunikasi yang dilakukan oleh petugas lapangan KB belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan indikator, sebagai berikut :

1. Petugas lapangan KB kurang menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan pertemuan yang dilakukan dengan melibatkan tokoh informal dan formal. Contohnya : Kader kesehatan di tiap dusun belum dilibatkan oleh petugas lapangan KB dalam berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
 2. Peranan petugas lapangan KB belum optimal dalam menciptakan opini masyarakat yang positif terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Contohnya : Petugas belum optimal dalam melakukan pertemuan atau kunjungan kepada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi.
 3. Petugas lapangan belum melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan penyampaian informasi melalui kegiatan pelatihan dan dukungan sumber daya. Contohnya: Petugas lapangan KB belum optimal melakukan lomba-lomba desa sehat untuk memotivasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi.
- Dari hal tersebut, organisasi yang sudah mulai ikut serta menangani program diajak dan mendalami lebih terperinci apa yang terjadi dan kepada mereka makin diberikepercayaan untuk ikut menangani program KB dalam lingkungannya sendiri. Para akseptor mulai diajak untuk memilih metode KB yang lebih dapat diandalkan dan tujuan KB makin diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengikut sertakan para akseptor itu sendiri untuk menjadi sumber daya manusia, menjadi petugas sukarela, untuk lingkungannya sendiri. Mulai dikenalkan program-program pos KB, posyandu, kegiatan peningkatan pendapatan keluarga, pembinaan anak-anak dan lain sebagainya.
- Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Wilayah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran."
- Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut.
1. Bagaimana komunikasi petugas lapangan KB (PLKB) di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?
 2. Bagaimana partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur

Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?

3. Bagaimana pengaruh komunikasi petugas lapangan KB (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?

B. LANDASAN TEORITIS

Pelaksanaan komunikasi oleh petugas sangatlah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan keikutsertaanya dalam setiap kegiatan. Adapun pengertian komunikasi menurut Rochjati (2013:67) mengemukakan, sebagai berikut: Komunikasi adalah menjalin hubungan yang akrab, kekeluargaan secara terbuka memberikan saran dan anjuran yang dibutuhkan. Sehingga dengan komunikasi keluarga menjadi sepakat. Mereka yakin untuk mengikuti dan melakukan saran-saran dan anjuran yang diberikan petugas kesehatan.

Selanjutnya Meilani (2010; 36) menyatakan bahwa : Komunikasi merupakan salah satu tahapan yang tidak boleh ditinggalkan dalam memberikan pelayanan KB. Komunikasi merupakan kunci dalam pelayanan KB. Tujuan komunikasi adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta baru, membina kelestarian peserta KB, dan meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural

yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan.

Menurut Fitriani (2010:94) dinyatakan bahwa dalam upaya komunikasi kesehatan dilakukan tiga strategi sebagai berikut :

1. Advokasi Kesehatan
Advokasi kesehatan yaitu pendekatan kepada para pemimpin atau pengambil keputusan agar dapat memberikan dukungan kemudahan, perlindungan pada upaya pembangunan kesehatan.
2. Bina Suasana
Bina suasana adalah upaya untuk menciptakan suasana kondusif untuk menunjang pembangunan kesehatan sehingga masyarakat terdorong melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Gerakan masyarakat
Gerakan masyarakat yaitu upaya memandirikan masyarakat agar secara proaktif memperaktekan hidup bersih dan sehat secara mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan melalui komunikasi yang dilakukan oleh petugas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi sehingga memberikan manfaat karena melalui komunikasi diharapkan masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman mengenai alat kontrasepsi.

Adapun pengertian partisipasi menurut Syarbaini (2007:69) adalah sebagai berikut: “Partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan bersama”.

Pidarta (2009:31-32), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai berikut : Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis menuimpulkan bahwa partisipasi yaitu turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama.

Sementara itu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhah (2014:152) dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*);
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*);
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*);
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*);

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka peneliti membuat anggapan dasar sebagai berikut :

1. Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas PLKB dalam mengkomunikasikan dan memberikan informasi yang bersifat mendidik kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman terhadap program-program kesehatan yang dilaksanakan
2. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi adalah peran serta pasangan usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan yang diharapkan.
3. Komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dapat meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. jika petugas melaksanakan komunikasi kepada masyarakat sesuai dengan tiga strategi dasar dalam melakukan komunikasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka penulis membuat anggapan dasar sebagai berikut:

1. Pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan performansi (atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.
3. Kepuasan pengunjung akan meningkat jika pelaksana kebijakan memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan harapan-harapannya.

Bertitik tolak dari anggapan dasar tersebut di atas maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut :
“Terdapat pengaruh yang positif komunikasi petugas lapangan KB (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan Kader serta pasangan usia subur. Teknik analisa data adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase yang selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan uji koefisien korelasi, koefisien detrminasi dan uji t.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat diketahui, sebagai berikut :

1) Advokasi

Advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, yaitu dengan membentuk jejaring advokasi atau forum kerjasama. Pengembangan kemitraan adalah upaya membangun hubungan para mitra kerja berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling memberi manfaat. Sehingga advokasi kemitraan berarti mempertahankan, berbicara serta mendukung seseorang untuk mempertahankan ide dan kerja sama dengan berbagai pihak. Sasaran advokasi adalah berbagai pihak yang di harapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat , mitra dikalangan pengusaha/swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan kelompok potensial lainnya dimasyarakat.

2) Bina suasana

Dalam penelitian ini bina suasana adalah menjalin kemitraan untuk pembentukan opini publik dengan berbagai kelompok opini yang ada di masyarakat seperti : tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi pemerintah dan lain-lain. Bina suasana dilakukan untuk sasaran sekunder atau petugas pelaksana diberbagai tingkat administrasi (dari pusat hingga desa). Dari wawancara diketahui dilakukan dengan cara melakukan pendekatan atau pengenalan adalah dengan cara mengundang perwakilan petugas promkes kesehatan puskesmas dari masing-masing kecamatan dan kemudian diberi pembekalan atau bimbingan teknis.

3) Gerakan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian maka Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran pada umumnya cukup baik dalam melaksanakan tiga strategi dalam pelaksanaan komunikasi sesuai dengan pendapat Fitriani (2010:94) walaupun masih harus ditingkatkan karena target penggunaan alat kontrasepsi belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dilihat dari beberapa dimensi sebagai berikut :

1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB masih harus ditingkatkan karena selama ini masyarakat masih kurang memberikan perhatian dalam program KB seperti kurangnya memberikan bantuan dana untuk memperlancar program keluarga berencana dan kurangnya memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi program KB.

3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat program KB masih rendah hal ini dibuktikan dengan

keikutsertaan masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi masih rendah serta keikutsertaan masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana posyandu yang telah dibangun untuk memperlancar keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi masih kurang dilakukan secara rutin sehingga menyebabkan pelaksanaan program KB belum optimal.

4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran cukup baik sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhah (2014: 152), sehingga untuk tercapainya program KB maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunjang terlaksananya program KB secara optimal dengan melibatkan diri dalam berbagai program KB.

3. Pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi

pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi dalam meningkatkan derajat kesehatannya diperlukan adanya dukungan sosial yang bisa didapat dari petugas kesehatan. Menurut Siswanto, (2010:62) menyatakan bahwa: Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan dengan baik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih dan menggunakan alat kontrasepsi dengan benar dan tepat. Pada akhirnya hal itu juga akan menurunkan tingkat kegagalan KB dan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk meraih keberhasilan tersebut, tentunya sangat diperlukan tenaga-tenaga konselor yang profesional. Mereka bukan hanya harus mengerti seluk-beluk masalah KB, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi pada tugasnya serta memiliki kepribadian yang baik, sabar, penuh pengertian, dan menghargai klien.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain, dengan kata lain

pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan alat kontrasepsi.

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam komunikasi yang dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dapat meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi hal ini dikarenakan dengan dilakukannya komunikasi yang baik dengan masyarakat maka masyarakat akan memperoleh pemahaman yang baik mengenai program KB.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh komunikasi petugas lapangan KB (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil angket menunjukkan bahwa adanya perolehan angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasikan diperoleh hasil sebesar 54,19%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori

cukup baik. Artinya bahwa Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran cukup baik karena telah melaksanakan tiga strategi dalam pelaksanaan komunikasi sesuai dengan pendapat Fitriani (2010:94). Begitupula hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaannya karena masih terdapat target penggunaan alat kontrasepsi yang tidak tercapai. Sementara itu berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) belum optimal yang dikarenakan petugas belum melaksanakan komunikasi yang melibatkan tokoh informal dan formal serta komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara rutin sehingga mengakibatkan keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan masih kurang.

2. Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil angket menunjukkan bahwa adanya perolehan angka rata-rata sebesar 188.25 dan berada pada kategori cukup, yang apabila

dipresentasikan diperoleh hasil sebesar 62.75%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Artinya bahwa Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran cukup baik sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhah (2014: 152). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan berbagai upaya seperti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada program KB. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi masih kurang mencapai target yang diharapkan.

3. Terdapat pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil

perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19 %, artinya 57,19 % partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) berpengaruh terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sebesar 57.19%, sedangkan sisanya 42.81% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti yang mempengaruhi terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran seperti tingkat pendidikan masyarakat, peran kader kesehatan maupun kepemimpinan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Fitriani, S. 2010. *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hartanto, Hanafi. 2004, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Pustaka. Sinar Harapan, Jakarta.

- Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI.
- Komala, Lukiati. 2009. *Ilmu Komunikasi Perspektif, Proses, dan Konteks*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Meilani N 2010. *Pelayanan Keluarga Berencana (dilengkapi dengan penuntun belajar)*. Penerbit Fitramaya.
- Sumber Perundang-Undangan :**
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa.